

JURNAL
IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN UMUM TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN KUASA PENAMBANG
DALAM MELAKUKAN REKLAMASI HUTAN
PASCA TAMBANG
(Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan selatan)

ARTIKEL ILMIAH
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum
Oleh:
RAKHMAD WICAKSONO
NIM.0910113164



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

LEMBAR PERSETUJUAN
JURNAL
IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN UMUM TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN KUASA PENAMBANG
DALAM MELAKUKAN REKLAMASI HUTAN
PASCA TAMBANG

(Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan selatan)

Oleh:

RAKHMAD WICAKSONO

NIM. 0910113164

Disetujui tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Efendi, SH. M.Hum.

NIP. 10600810198601002

Agus Yulianto, SH.M.S

NIP. 19770352009122001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Efendi, SH. M.Hum.

NIP. 10600810198601002

ABSTRAKSI

Rakhmad wicaksono, hukum adminisitrasi negara, fakultas hukum Universitas Brawijaya, *Implementasi pasal 31 ayat 4 peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum terkait dengan pelaksanaan kuasa penambang dalam melakukan reklmasi hutan pasca tambang*, Lutfi Efendi, SH. M.Hum, Agus Yulianto, SH.M.S.

Skripsi ini membahas tentang implementasi peraturan daerah propinsi Kalimantan seltan tentang pertambangan umum terkait dengan reklmasi hutan pasca berakhirnya tambang batubara, yang terjadi di kabupaten tanahumbu terdapat banyak kerusakan akibat oleh beberapa tambang batu bara yang setelah melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara yang telah berakhir tidak melakukan reklmasi tambang sehingga landscape lahan terjadi kerusakan yang sangat berat terlihat seperti lubang yang sangat besar.

Reklamasi yang dihubungkan dengan kegiatan pertambangan yaitu suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Revegetasi merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosisologis yaitu pendekatan yang merupakan aturan hukum atau yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian pada realita

Bahwa pelaksanaan pertauran daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengeloaan pertambangan umum terkait tentang reklmasi hutan pasca tambang dimana dalam pelaksanaannya dirasakan masih dapat dilaksanakan dengan baik namun masih mempunyai beberapa masalah dari pelaksanaan itu sendiri yaitu kurangnya petugas lapangan dalam

mendata, mengelola aset ijin pinjam lahan tambang batubara, kondisi lapangan yang dimana penambang batubara melakukan ijin pinjam lahan rata-rata dikawasan hutan tanah bumbu yang sangat sulit untuk petugas dalam melakukan survey lapangan.

saran yang dapat diberikan adalah Lebih meningkatkan pengawasan dan pengelolaan ijin pinjam pakai lahan oleh perusahaan tambang batubara yang sengaja tidak melakukan reklamasi hutan yang berakibat rusaknya lingkungan. Alat transportasi yang memadai untuk petugas lapangan dinas kehutanan tuntutan dalam pengawasan karena posisi pertambangan batubara ada didalam hutan sehingga apabila alat penunjang transportasi yang baik diharapkan pengawasan pertambangan batubara lebih optimal. Ketegasan dari dinas kehutan pada perusahaan pertmbangan batubara yang sengaja tidak melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya tambang batubara.

ABSTRACT

Rakhmad wicaksono, state administrative law, UB law faculty, *Implementation of article 31, paragraph 4 south Kalimantan provincial regulation No. 2 of 2009 concerning the management of public mining associated with the implementation of the power of miners in conducting post-mining forest reclamation*, Lutfi Efendi, SH. Hum, Agus Yulianto, SH.M.S.

This thesis discusses the implementation of local regulations on mining Kalimantan seltan commonly associated with forest reclamation after the end of the coal mine, which occurred in the district there is a lot of ground spice damage caused by several coal mines after coal mining exploration and exploitation has ended does not perform reclamation land mines so that the landscape is very heavy damage is visible as a very large hole.

Reclamation associated with mining activities, namely an attempt to repair or restore the land and vegetation in forest areas damaged as a result of mining operations and energy in order to function optimally as intended, restore and enhance degraded soil conditions (critical), so that can function optimally, both as an element of production, water management and the media as an element of protection of the environment. Revegetation is a business or replanting mined lands.

The method used in this study is that sosialogis juridical approach is legal or juridical rules combined with examining social facts related to the research problem. This approach aims to systematically and accurately describe the population or about a particular field as well as trying to describe a situation or event in reality

That implementation pertauran south Kalimantan province No. 2 of 2009 on the general management of mining related on post-mining forest reclamation which in practice can still be felt well executed but still has some problems of implementation itself is the lack of officers in the field to record, manage assets and loan license coal mining areas, where field conditions do permit coal miners borrow an average land area of forest land that is very difficult spice to the officer in conducting field surveys.

advice that can be given is more improved control and management of a land use permit by coal mining companies that do not deliberately undermine forest reclamation environment. Adequate transportation for field personnel in monitoring forest service demands due to the position of coal mining is in the woods so that when the tool is expected to support good transport more coal mining optimal. Ketegasan supervision of the forestry department pertambangan coal companies do not intentionally forest after the end of mine reclamation coal.

1. PENDAHULUAN

Pertambangan batubara termasuk komoditas utama yang ada di Indonesia selama ini dengan kekayaan alam yang luar biasa termasuk batubara Negara termasuk pengeksportambang batubara terbesar di asia tenggara sehingga dengan kekayaan alam yang berlimpah maka menjadi pedapatan yang baik untuk Negara kita sendiri.

Pasal 33 undang-undang dasara 45 butir ketiga menyebutkan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,atas dasar tersebut semua warga Negara berhak untuk melakukan pertambangan batubara sehingga tingkat kemakmuran warga Negara dapat terpenuhi dengan baik.¹di negara indonesia terdapat tempat atau pulau yang memiliki tingkat kekayaan alam yaitu batubara terbesar di Indonesia anantara lain Sumatra,Sulawesi,dan Kalimantan.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang ²Dengan banyaknya potensi batubara yang ada dindonesia tidak dapat dipungkiri banyak terdapat juga penambang batubara itu sendiri,sehingga esplorasi dan eksploitasi pertambangan batubara membuat dampak buruk yaitu ongkos ekologi yang besar seperti perubahan landscape tanah akibat eksploitasi tambang batubara seperti lubang yang snagat besar karena di Indonesia metode tambang terbuka termasuk metode yanag banyak dilakukan karena berbiaya yang sangat murah namun mempunyai dampak yang sangat buruk untuk lingkungan. Di kalimantan selatan banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara seharusnya ketika berakhirnya eksploitasi tambang batubara perusahaan wajib melakukan reklamasi lahan akibat pertambangan batubara. Padahal reklamasi lahan akibat tambang batubara yang ada dikalimantan selatan telah dilindungi oleh undang-undang yaitu undang-undang peraturan daerah

¹ Undang-undang dasar 45 pasal 33 butir ketiga

² Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum pasal 31 ayat 4.

Pasal 31 ayat 4 peraturan daerah provinsi Kalimantan selatan no 2 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dan atau revegetasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen ANDAL(analisis dampak lingkungan) dan RKL-RPL(rencana pengelolaan lingkungan-rencana peantaua lingkungan) atau Dokumen UKL-UPL(upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan)”.

Dalam pasal tersebut terdapat 3 point penting yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pelaksanaan reklamasi hutan pasca berakhirnya eksploitasi tambang batubara khususnya di wilayah Kalimantan selatan, yaitu Pembinaan(1), pengendalian(2), dan pengawasan(3) reklamsi hutan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara pemegang kuasa penambang. Gubernur selaku kepala daerah menunjuk suatu instansi yang berwenang dalam hal pengawasan reklamasi hutan pasca berakhirnya eksploitasi tambang batu bara yaitu badan dinas kehutanan. Badan dinas kehutanan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan reklamasi hutan oleh suatu perusahaan tambang dengan baik dan benar,serta turun kelapangan dengan upaya apakah suatu perusahaan melakukan reklamasi hutan menurut undang-undang yang berlaku karena banyaknya perusahaan batu bara melanggar undang undang dengan tidak tidak melakukan reklmasi hutan.

Pemegang kp (kuasa penambang) diwajibkan untuk melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya eksploitasi minerba karena untuk memulihkan usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.³

³ [http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan.html\(diaskes](http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan.html(diaskes) pada tanggal 10 juli 2013)

Kalimantan Selatan dikenal kaya dengan potensi batubara, nomor 3 di Indonesia setelah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Keberadaannya menyebar di seluruh Kabupaten di Kalsel. Pengerukannya ada yang secara legal, dengan menggunakan ijin KK(kontrak karya),PKP2B(perjanjian karya pengusaha batubara) atau KP(kuasa penambang) yang diterbitkan pemerintah daerah. Namun tidak sedikit yang merupakan tambang ilegal⁴. Semuanya menggunakan metode penambangan secara terbuka, yang berbiaya murah namun memiliki ongkos ekologi yang sangat besar, termasuk dampaknya terhadap masyarakat di sekitar kawasan, lingkungan dan keberlanjutan alam. Tambang batu bara merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dan pembangunan nasional baik sebagai sumber energi maupun sumber devisa Negara⁵. Produksi batu bara Indonesia yang di ekspor sebesar 75% dari 327 juta ton total produksi batu bara, sedangkan sisanya 25% hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuan ekspor batu bara Indonesia terutama ke Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Eropa sisanya untuk kebutuhan dalam negeri. Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis, terletak di antara 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 1 10' 14" Lintang Selatan dan terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan propinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Propinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan adalah 3.778.383,73 hektar atau hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Wilayah bagian Barat dan Timur Propinsi Kalimantan Selatan dibagi dua oleh jajaran Pegunungan Meratus. Secara administratif Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin meliputi 11 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Batola, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan dan Tanah Bumbu serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Wilayah Kalimantan selatan banyak dialiri oleh sungai, paling tidak tercatat ada 64 sungai dan anak sungai yang membentuk 15 Sub Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai besar dan penting di Kalsel antara lain Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Nagara, Sungai Riam Kanan,

⁴ [http://green.kompasiana.com/penghijauan/2012/07/01/penambangan-batu-bara-liar-di-desa-sungai-danau-468516.html\(diaskes](http://green.kompasiana.com/penghijauan/2012/07/01/penambangan-batu-bara-liar-di-desa-sungai-danau-468516.html(diaskes) pada tangga 11 juli 2013)

⁵ [http://arsipteknikpertambangan.blogspot.com/2011/01/tambang-terbuka-surface-mining.html\(diaskes](http://arsipteknikpertambangan.blogspot.com/2011/01/tambang-terbuka-surface-mining.html(diaskes) pada tanggal 11 juli 2013)

Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kurau, Sungai Pelilingkau, Sungai Kintap, Sungai Batu Licin, Sungai Sampanahan dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. Diatas kertas menurut catatan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2010, hutan Kalsel menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177 ha adalah hutan produksi ⁶terbatas. Data ini sama dengan yang dikeluarkan BPS Kalsel pada tahun 2010, padahal kerusakan hutan Kalimantan Selatan terus berlangsung, dari data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan 987.041,14 Ha (2001) dan 935.900,00 (2010) hutan kalsel telah berkurang 51.141 Ha atau setiap harinya kita kehilangan 140 ha luasan hutan atau 141 kali luas lapangan sepak bola. Angka yang sama juga terjadi pada tahun 2010, sehingga estimasi luasan hutan yang tersisa pada tahun 2010 adalah 884.758,86 ha⁷. Potensi sumber daya alam berupa tambang batubara yang ada di Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin dan Tabalong). Berdasarkan data dari Indonesian Coal Mining Association tahun 2010 stock cadangan batubara Kalimantan Selatan yang terukur (pasti) adalah 2,428 milyar ton dan yang terindikasi sekitar 4,101 milyar ton. Sehingga paling tidak sampai saat ini terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 milyar ton dari data yang berasal dari Dinas Pertambangan. Produksi batubara Kalimantan Selatan dari perusahaan pertambangan batubara pemegang PKP2B mencapai 10.997.283,95 ton, data produksi batubara dari para pemegang kuasa penambangan mencapai angka 67.298.358 ton. Kalau kita lihat betapa semakin tahun semakin besar jumlah batubara yang dieksploitasi dan telah menempatkan Kalsel sebagai daerah terbesar kedua penghasil batubara di Indonesia.⁸ Karena banyaknya usaha pertambangan batu bara tidak dapat dipungkiri akan banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara dan lebih

⁶<http://banjarmasinkota.go.id/> (diakses pada tanggal 15 juli 2013)

⁷<http://tpmkalimantan.wordpress.com/2008/10/05/fenomena-batubara-di-kalsel/>(diakses pada tanggal 15 juli 2013)

⁸<http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan.html>(diakses pada tanggal 16 jui 213)

parah lagi banyak kuasa penambang tidak mereklamasikan lingkungan yang telah dieksploitaserta rata – rata kuasa penambang yang ada dikalimantan selatan menggunakan metode open pit minning atau system pertambangan terbuka yang sangat pastiakan merusak lingkungan dan hasilnya akan menjadi lubang yang sangat besar yang mengakibatkan lingkungan disekitar area tambang menjadi hancur dan tidak dapat digunakan lagi.aktivitas tambang batu bara menghadapi masalah besar terhadap kerusakan lingkungan sejak tambang dimulai dan akan berlangsung seterusnya apabila tidak dilakukan perencanaan perbaikan lingkungan melalui reklamasi .Areal tambang batu bara yang tidak direklmasi akan menimbulkan masalah seperti pada musim hujan mengakibatkan erosi yang tinggi dan kekeringan pada saat musim kemarau. Selain itu air hujan yang jatuh hampir seluruhnya menjadi aliran permukaan karena tidak terinfiltrasi kedalam tanah hal tersebut terjadi karena rusaknya partikel tanah oleh energy kinetic hujan karena kurangnya tanaman penutup lahan (cover crops). Aliran permukaan banyak membawa partikel tanah yang aya akan unsure hara.

Jejak kerusakan yang ditinggalkan oleh batubara tidak berhenti di saat pembakarannya. Di ujung rantai kepemilikannya, terdapat pertambangan batubara yang ditinggalkan setelah dieksploitasi habis, limbah pembakaran batubara, dan hamparan alam yang rusak tanpa pernah akan bisa kembali seperti sediakala.

Pertambangan yang ditinggalkan pasca dieksploitasi habis, meninggalkan segudang masalah untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Lubang-lubang raksasa, drainase tambang asam, dan erosi tanah hanya sebagian dari masalah. Hamparan alam yang rusak adalah adalah kondisi permanen yang tak akan pernah pulih , sekeras apapun usaha yang dilakukan untuk mengembalikannya.

Limbah pembakaran batubara sangat beracun, dan membahayakan kesehatan masyarakat, tembaga, cadmium dan arsenic adalah sebagian dari zat toksik yang dihasilkan dari limbah tersebut, yang masing-masing memicu keracunan, gagal ginjal, dan kanker.Setiap rantai dalam siklus pemanfaatan batubara meyumbangkan kerusakan yang diakibatkan

oleh energi kotor ini—masing-masing dengan caranya sendiri. Kerusakan ini nyata dan mematikan

Dan oleh karena itu apabila dibiarkan lahan bekas pasca tambang begitu saja. Maka sangat merugikan lingkungan maupun kita sendiri. Dan reklamasi itupun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena memiliki cara dan tahapan yang dapat mensukseskan reklamasi itu sendiri dan biayanya sangatlah mahal untuk dapat dikatakan berhasil di reklamasi kembali hutan yang sudah rusak dan tercemar. Biasanya para penambang batu bara berskala kecil dan menengah yang deposit keuangannya yang tidak terlalu besar seringkali memangkas biaya untuk reklamasi yang hasilnya tidak efektif dan dapat dikatakan gagal karena biaya yang dikeluarkan hanya untuk menutupi lubang bekas tambang saja dengan tanah yang seharusnya bukan hanya ditutupi namun perlu dilakukan penanaman hutan kembali sehingga lahan tersebut dapat dikembalikan seperti semula bukan bekas tambang yang hanya ada tanah yang gersang tanpa tanaman. Dan sebetulnya biaya reklamasi itu tidak sebanding dengan keuntungan eksploitasi batu bara namun entah mengapa para penambang batubara merasa enggan untuk melakukan reklamasi hutan kembali ke kondisi yang selumnya. dan lebih parahnya lagi pemerintah seperti dinas kehutanan seperti hanya diam saja tidak melakukan investigasi dan melakukan sanksi untuk para penambang yang tidak melakukan reklamasi setelah berakhirnya eksploitasi tambangnya. seharusnya dinas kehutanan harusnya melindungi dan bertindak lanjut lahan hutan yang telah rusak untuk dikembalikan seperti semula walaupun secara hukum telah ada undang undang tentang reklamasi namun di lapangan tidak seperti yang diharapkan dan tiap tahun semakin rusak karena bertambahnya penambang yang baru melakukan eksploitasi batu bara apabila tidak ditindak lanjut maka tanah bumi Kalimantan tidak akan seperti dulu lagi dan sekarang hanya bersisa bekas lubang lubang besar akibat eksploitasi tambang berlebihan tanpa adanya reklamasi hutan.

Kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pelanggaran oleh beberapa perusahaan batubara yang tidak melakukan reklamasi hutan dan melanggar undang undang yang mengharuskan perusahaan batu bara melakukan reklamasi hutan kembali ke lingkungan aslinya yang bisa di pakai kembali sebagai hutan dan kedepannya dapat di gunakan untuk penerus selanjutnya

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan pemasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi pasal 31 ayat 4 Peraturan daerah Provinsi Kalimantan selatan Tentang Perambangan Umum dalam pelaksanaan dan pengawasan reklamasi hutan yang dilakukan oleh dinas kehutanan yang dilapangan banyak terjadi pelanggaran yang seharusnya dapat diatasi ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan Pembinaan terhadap beberapa perusahaan yang melanggar yaitu tidak melakukan reklamasi hutan pasca tambang dan bagaimana solusinya?

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan implementasi pasal 31 ayat 4 provinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 Pelaksanaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam melakukan apakah peraturan tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang ada di lapangan namun nyatanya peraturan tersebut dapat dikatakan tidak terbukti berhasil karena di kawasan hutan yang ada di tanah bumbu banyak sekali penambang batubara yang melakukan kerusakan lingkungan karena tidak merevegetasi ulang lahan landscape yang telah hancur karena eksploitasi batubara yang menyisakan lubang yang besar tanpa adanya tindakan mereklamasikan kembali lahan yang telah hancur.Sedangkan peranan pemerintah yang sebagai pemberi kuasa dalam menerbitkan surat keputusan dalam ijin usaha tambang batubara mengharuskan penambang batubara memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. MEMPUNYAI SITE PLAN PERTAMBANGAN

Yang dimaksud dengan site plan pertambangan itu adalah sebelum melakukan eksploitasi tambang batubara perusahaan harus mempunyai data-data eksplorasi lahan yang hendak di eksploitasi isi kandungan yang ada di bawah tanah apakah memang betul mempunyai kandungan batubara serta volume bukaan untuk mengambil batubara nantinya sehingga tidak percuma karena konsekuensi pasti menghancurkan landscape hutan yang berakibat kerusakan lingkungan.Site Plan

harus di berikan kepada pemerintah atau dinas yang terkait karena pemerintah dapat menjaga serta memonitoring kegiatan pertambangan batubara karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal mengawasi kegiatan pertambangan batubara.⁹

b. Mempunyai Jaminan Reklamasi

Penambang batubara wajib mempunyai jaminan reklamasi karena apabila terjadi suatu kegiatan pertambangan batubara dalam melakukan eksploitasi tambang batubara apabila penambang tidak melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya ijin eksploitasi batubara maka dinas yang mempunyai wewenang akan menggantikan kegiatan reklamasi hutan yang telah rusak akibat pertambangan batubara, jaminan reklamasi hutan itu adalah berupa uang untuk biaya melakukan reklamasi sesuai dengan ijin pinjam pakai lahan pertambangan batubara dengan nilai nominal tidak bisa ditentukan karena dalam melakukan reklamasi perbaikan bukan hanya landscape tanah namun juga penanaman hutan dan pembuangan limbah cair bekas pengeboran batubara karena batubara juga mempunyai zat yang dapat merusak ekosistem lahan itu sendiri apabila batubara tidak diambil dibiarkan ada di atas tanah. Jadi biaya untuk jaminan reklamasi sesuai dengan perjanjian antara pihak penambang dengan dinas yang berwenang dalam melakukan reklamasi itu sendiri¹⁰

Penambang Batubara wajib Mempunyai Ijin Pinjam pakai Dan Ijin Eksplorasi

Yang dimaksud dengan ijin pinjam pakai adalah perjanjian antara pemerintah dan penambang batubara dalam melakukan ijin pinjam pakai lahan yang akan digunakan untuk eksploitasi pertambangan batubara karena lahan yang digunakan pihak penambang batubara adalah milik pemerintah tanah bumbu sehingga harus dalam melakukan eksploitasi harus mempunyai dokumen ijin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang yaitu dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu.

Sedangkan ijin ekplorasi adalah ijin yang dimana penambang ingin melakukan eksplorasi terlebih dahulu untuk melihat apakah lahan yang ingin di lakukan pertambangan mempunyai kandungan batubara sehingga nanti tidak mendapatkan

⁹ Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu, pada tanggal 13 nov 2013

¹⁰ Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu, pada tanggal 13 nov 2013

kerugian ke depannya,sebenarnay ijin ekplorasi ini hanya bersifat penelitian namun sudah menjadi standar operasional pihak penambang yang nantinya pemerintah atau dinas yang terkait akan meminta hasil ekplorasi terlebih dahulu serta meniliti apakah memang lahan yang nantinya dipakai memang betul untuk ijin pinjam melakukan pertambangan batubara sebelum diterbitkannya surat keputusan boleh melakukan pertambangan.¹¹

c. Mempunyai Dokumen ANDAL Dan RKL-RPL

Penambang batu bara wajib mempunyai dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan RKPL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan),dokumen andal termasuk hal yang penting karena bertujuan untuk memulihkan lahan yang rusak akibat ekplotasi batubara sehingga kedepannya lahan yang telah diperbaiki dpat dipergunakan kembali sesuai dengan kebutuhan nantinya,dokumen andal termasuk dalam site plan suatu perusahaan batubara karena hal yang wajib dilakukan sehingga merupakan prosedur wajib dalam melakukan pertambangan batubara termasuk dalam kewajiban penambang batubara,hal ini penting karena nanti kedepannya pemerintah selalu memantau dan mengelola lahan yang dipinjam perusahaan tambang batubara apakah nantinya penambang memang benar – benar melakukan perbaikan lingkungan sesuai dengan dokumen ANDAL dan RKL-RPL untuk mendapatkan persetujuan dokumen ANDAL dan RKL-RPL pihak penambang harus mengurus ijin kepada dinas Badan Lingkungan Hidup.

Dalam hal pengawasan pihak dinas Kehutanan setiap 5 bulan selalu melakukan tindakan langsung kelapangan apakah masih sesuai dengan bentang lahan,mendata ulang batas wilayah ijin pinjam pakai lahan sesuai dengan perjanjian dari surat keputusan gubernur sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penggunaan kawasan pinjam pakai lahan.

Namun masih banyak kejanggalan yang ada dilapangan yaitu banyaknya lahan yang rusak karena pertambangan batubara yang tidak peduli dengan lingkungan yang sangat merugikan pemerintah kabupaten tanah bumbu,walaupun sudah ada peraturan

¹¹ Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad AsmadiI kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu,pada tanggal 13 nov 2013

daerah yang mewajibkan penambang batubara wajib melakukan reklamasi hutan. pengawasan pemerintah dalam bertindak lanjut masalah kerusakan lingkungan karena tidak adanya reklamasi pasca berakhirnya pertambangan ini memang sangat sulit karena staf dan pegawai yang sangat sedikit tidak mampu mengurus perusahaan pertambangan yang jumlahnya sangat banyak sehingga para pegawai lapangan tidak cukup mampu menangani masalah ini.

Dinas kehutan wajib memonitoring dan mengevaluasi semua perusahaan penambang batubara yang tidak secara sengaja tidak melakukan reklamasi dengan diberi peringatan tidak boleh memperpanjang kontrak ijin pinjam pakai selama setahun apabila terbukti lalai dalam memperdulikan lingkungan dengan tidak merevegetasi ulang landscape lahan yang telah rusak akibat aktivitas tambang batubara.¹²

d. Penambang Batubara wajib Mempunyai Ijin Pinjam pakai Dan Ijin Eksplorasi

Yang dimaksud dengan ijin pinjam pakai adalah perjanjian antara pemerintah dan penambang batubara dalam melakukan ijin pinjam pakai lahan yang akan digunakan untuk eksploitasi pertambangan batubara karena lahan yang digunakan pihak penambang batubara adalah milik pemerintah tanah bumbu sehingga harus dalam melakukan eksploitasi harus mempunyai dokumen ijin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang yaitu dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu.

Sedangkan ijin ekplorasi adalah ijin yang dimana penambang ingin melakukan ekplorasi terlebih dahulu untuk melihat apakah lahan yang ingin di lakukan pertambangan mempunyai kandungan batubara sehingga nanti tidak mendapatkan kerugian ke depannya,sebenarnay ijin ekplorasi ini hanya bersifat penelitian namun sudah menjadi standar operasional pihak penambang yang nantinya pemerintah atau dinas yang terkait akan meminta hasil ekplorasi terlebih dahulu serta meniliti apakah memang lahan yang nantinya dipakai memang betul untuk ijin pinjam melakukan pertambangan batubara sebelum diterbitkannya surat keputusan boleh melakukan pertambangan.¹³

¹² Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu,pada tanggal 13 nov 2013

¹³ Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad AsmadiI kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu,pada tanggal 13 nov 2013

2. hambatan–hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan Pembinaan terhadapbeberapa perusahaan yang melanggar yaitu tidak melakukan reklamasi hutan pasca tambang serta dengan solusinya.

1. Berhubung dengan hambatan di lokasi lapangan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat tambang batubara yang seharusnya dapat diperbaiki yaitu dengan melakukan reklamasi hutan pasca berakhirnya pertambangan batubara dapat ditemukan beberapa hambatan yang seharusnya dapat diselesaikan yaitu :¹⁴

a) Good will dari perusahaan tambang batubara

Yang dimaksud dengan good will perusahaan tambang batubara adalah kesanggupan dalam memperdulikan lingkungan areal ekplotasi tambang batubara tidak hanya mencari keuntungan dalam melakukan tambang batubara harus juga melakukan tanggung jawab untuk lingkungan karena penambang batubara ditanah bumbu melakukan pengerukan tambang batubara menggunakan sistem open pit minning atau yang disebut juga dengan metode tambang terbuka.

Metode tambang terbuka yang dalam pengerukannya membuka lahan melalui pengerukan tanah hingga beberapa meter yang menghasilkan lubang yang besar,dalam segi ekonomi memang lebih ekonomis serta biaya operasional tidak terlalu besar hanya saja mempunyai dampak negative kerusakan lingkungan yang sanagat besar sehingga terjadi kerusakan bukan hanya kerusakan tanah namun juga air dan udara.

Dengan adanya kesanggupan bertanggung jawab yang memperdulikan lingkungan diharapkan ketika areal tambang dapat diperbaiki dengan cara reklamasi hutan dengan cara yang baik maka lingkungan sekitar lahan tambang bekas eksploitasi itu nantinya dapat dipergunakan kembali yang akhirnya tercipta suatu pertambangan batubara yanga ramah lingkungan karena proses pertambangan tidak hanya mencari keuntungan semata namun juga tanggungjawab dalam resiko pertambangan yaitu kerusakan lingkungan yang dapat diatasi.

b). kurangnya petugas lapangan dalam pendataan lahan tambang

¹⁴ Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanah bumbu,pada tanggal 13 nov 2013

Dinas kehutanan wajib menjaga dan memantau langsung ke lapangan yang dipinjam oleh penambang batu bara sesuai dengan kontrak ijin pinjam pakai lahan, dengan banyaknya ijin tambang batubara di kabupaten tanahumbu petugas lapangan dinas kehutanan merasa kekurangan orang dalam penjagaan dan pemantauan lapangan, tidak hanya masalah kekurangan petugas namun juga kondisi jalan ke lokasi proyek pertambangan yang sangat sulit karena lokasi tambang batubara berada didalam hutan sangat jauh dari jalan protokol sehingga membutuhkan kendaraan yang besar dan kuat untuk melakukan perjalanan darat.

c). maraknya penambang ilegal atau liar yang tidak bertanggungjawab

dikawasan kabupaten tanahumbu termasuk mempunyai penambang liar atau illegal paling tinggi di daerah Kalimantan selatan, penambang illegal merupakan penambang yang tidak mempunyai surat keputusan dari gubernur dan tidak mempunyai surat ijin pinjam pakai lahan, penambang liar melakukan metode tambang dengan cara open pit mining atau tambang terbuka dengan mengeksploitasi batubara secara cepat dan hemat karena herjadi razia harus bersembunyi dari penegak hukum dan juga mencari celah apabila di kabupaten tanahumbu sehingga apabila sudah terjadi pengerukan batubara dan telah habis penambang batubara segera meninggalkan proyek pertambangan tanpa bertanggung jawab dalam melakukan reklamasi hutan.

Penambang illegal atau liar merupakan termasuk penyumbang terbesar kerusakan lingkungan karena tidak ada reklamasi lahan hanya membiarkan rusak tanpa adanya perbaikan.

2. Solusi mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan pengawasan perusahaan tambang batubara.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan permasalahan implementasi baik dari segi pelaksanaan maupun pengawasan maka penulis mencoba mencari solusi dari pembahasan diatas. Hasil wawancara dengan petugas dinas kehutanan kabupaten tanahumbu telah dikemukakan beberapa solusi yang diberikan guna mengatasi masalah hambatan dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang pertambangan umum di kabupaten tanahumbu sebagai berikut¹⁵ :

¹⁵ Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadil kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanahumbu, pada tanggal 13 nov 2013

a). kesadaran peduli dengan lingkungan

Dalam melakukan pertambangan batubara tidak hanya mencari keuntungan ekonomisnya saja namun juga diharapkan untuk memperdulikan lingkungan karena sudah menjadi dampak negative apabila pertambangan batubara menggunakan metode tambang terbuka yang akhirnya kerusakan lingkungan menjadi ongkos negatif dari penambangna terbuka, memang dalam melakukan reklamasi lahan hingga menjadikan lingkungan sekitar menjadi lebih baik atau kembali ke lahan yang seperti sedia kala membutuhkan dana yang sangat besar namun juga itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan reklamasi lahan karena keuntungan dari pertambangan batubara tidak sebanding dengan biaya operasional melakukan eklmasi lahan, tidak membutuhkan biaya sangat besar dalam melakukan reklmasi apabila dilihat dari perbandingan keuntungan penjualan batubara itu sendiri.

Sangat miris memang banyak perusahaan yang tidak peduli dengan lingkungan mereka hanya mencari keuntungan namun tidak memperduikan lingkungan seperti contoh di kecamatan satui memiliki ratusan penambang baik itu golongan pkp2b,kp,maupun penambang rakyat banayak sekali perusahaan tersebut tidak melakukan reklamasi lahan sehingga dibiarkan saja terjadi kerusakan lubang yang sangat besar,dan pihak dinas kehutanan kewalahan akibat ulah penambang batubra yang tidak pro dengan lingkungan.

b). Tidak adanya sanksi tegas terhadap penambang batubara

Walaupun sudah terbukti melakukan pelanggaran namun tetap saja tidak ada sanksi tegas, dilapangan sudah terlihat banyak kerusakan lingkungan akibat tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan tambang batubara yang sejatinya sudah sebuah keharusan dari perusahaan tambang batubara, pihak dinas kehutanan hanya memeberikan sanksi hanya berupa surat teguran untuk perusahaan tambang batubara yang tidak melakukan reklmasi lahan dan diwajibkan segera melakukan revegetasi ulang lahan sehingga kembali sedia kala.

Dinas kehutan tidak bertanggung jawab dalam memberikan sanksi karena hanya bertugas menjalankan pengawasan dan penjaggan aset lahan yang dipinjam pakai oleh perusahaan

tambang batu bara. Namun masih ada beberapa perusahaan tambang batubara yang masih memperdulikan lingkungan dengan melakukan reklamasi hutan pasca berakhirnya eksploitasi batubara tetapi setelah habisnya ijin kontrak tambang yang dilihat melakukan reklamasi tidak sesuai dengan prosedur hanya menutupi lubang dengan tanah sehingga menjadikan lahan menjadi tandus serta gersang tanpa adanya tanaman.

IV. PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan Dari bab IV Maka Dapat Disimpulkan :

1. Bahwa pelaksanaan pertauran daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum terkait tentang reklamasi hutan pasca tambang dimana dalam pelaksanaannya dirasakan masih dapat dilaksanakan dengan baik namun masih mempunyai beberapa masalah dari pelaksanaan itu sendiri yaitu kurangnya petugas lapangan dalam mendata, mengelola aset ijin pinjam lahan tambang batubara, kondisi lapangan yang dimana penambang batubara melakukan ijin pinjam lahan rata-rata di kawasan hutan tanah bumbu yang sangat sulit untuk petugas dalam melakukan survey lapangan.
2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan pembinaan terhadap beberapa perusahaan yang melanggar yaitu tidak melakukan reklamasi hutan pasca tambang adalah :
 - a). Tanggung jawab dari penambang batubara yang masih dirasakan kurang peduli dengan lingkungan, penambang hanya mencari keuntungan dalam penjualan batubara namun tidak memikirkan konsekuensi dari pertambangan yaitu rusaknya lingkungan akibat pengerukan tambang batubara tanpa melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya kegiatan pertambangan batubara yang sebenarnya sudah menjadi sebuah keharusan perusahaan tambang batubara padahal reklamasi hutan sudah tertera dalam pertauran daerah Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 pada pasal 31 ayat 4.
 - b). Kurangnya petugas dinas kehutanan dalam mendata ijin pinjam lahan perusahaan tambang batubara yang ada di kabupaten tanah bumbu, di kabupaten tanah bumbu termasuk salah satu pertambangan batubara yang paling besar yang ada di Kalimantan selatan mempunyai banyak golongan pertambangan seperti pkp2b, kp, dan penambang rakyat. Dengan banyak penambang batubara petugas yang sehingga pelaksanaan

peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 belum bekerja maksimal.

c). Masih kurangnya ketegasan dari dinas kehutanan kepada pelaku perusahaan penambang batubara karena hasil penelitian lapangan masih banyak perusahaan tambang batubara tidak melakukan reklamasi hutan

3. Solusi yang dilakukan untuk hambatan dalam implementasi pasal 31 ayat 4 tentang pengelolaan pertambangan umum terkait dengan reklamasi hutan pasca tambang adalah :

a). Good will dari perusahaan tambang batubara dalam tanggung jawab melakukan reklamasi hutan.

b). Ketegasan dari dinas kehutanan kepada penambang batubara yang tidak melakukan reklamasi sehingga kedepannya tidak terulang lagi kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara

c). Mensosialisasikan ke perusahaan penambang batubara dalam kewajiban untuk mereklamasi hutan yang peduli lingkungan oleh dinas kehutanan

d). Kelengkapan alat transportasi yang lebih baik karena petugas lapangan dinas kehutanan dalam mengawasi dan mengelola merasa susah untuk ke lokasi izin pinjam pakai perusahaan tambang batubara yang rata-rata ada di kawasan hutan di kabupaten tanahumbu dengan medan yang sangat sulit dimana tidak adanya jalan yang baik.

B. Saran menurut peneliti

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai implementasi peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum, maka saran yang dapat diberikan adalah :

a). Lebih meningkatkan pengawasan dan pengelolaan izin pinjam pakai lahan oleh perusahaan tambang batubara yang sengaja tidak melakukan reklamasi hutan yang berakibat rusaknya lingkungan.

b). Alat transportasi yang memadai untuk petugas lapangan dinas kehutanan tuntutan dalam pengawasan karena posisi pertambangan batubara ada didalam hutan sehingga apabila alat penunjang transportasi yang baik diharapkan pengawasan pertambangan batubara lebih optimal.

c). Ketegasan dari dinas kehutan pada perusahaan pertmbangan batubara yang sengaja tidak melakukan reklamasi hutan setelah berakhirnya ekspoitasi tambang batubara karena dilapangan terjadi banyak pelanggaran sehingga kerusakan lingkungan akibat tanpa adanya reklmasi hanya meninggalkan lubang besar tanpa adanya revegetasi lahan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundangan

Undang-undang dasar 45 pasal 33 butir ketiga

Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan

Umum

internet

<http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan.html>(diakses pada tanggal 10 juli 2013)

¹ <http://green.kompasiana.com/penghijauan/2012/07/01/penambangan-batu-bara-liar-di-desa-sungai-danau-468516.html>(diakses pada tanggal 11 juli 2013)

¹ <http://arsipteknikpertambangan.blogspot.com/2011/01/tambang-terbuka-surface-mining.html>(diakses pada tanggal 11 juli 2013)

<http://banjarmasinkota.go.id/> (diakses pada tanggal 15 juli 2013)

¹ <http://tpmkalimantan.wordpress.com/2008/10/05/fenomena-batubara-di-kalsel/>(diakses pada tanggal 15 juli 2013)

<http://www.bapustarda-kalsel.go.id/2013/06/26/dinas-pertambangan-dan-energi-provinsi-kalimantan-selatan.html>(diakses pada tanggal 16 jui 213)

wawancara

Hasil Wawancara Dari Bapak Ahmad Asmadi I kasi IPPM kepala staf tata usaha dinas kehutanan kabupaten tanahumbu, pada tanggal 13 nov 2013